
ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN PDRB TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI MALUKU (STUDI KASUS KABUPATEN KOTA)

Ali Tutupoho

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia

ABSTRACT

The problem in this study is that open unemployment in Maluku Province has increased, this is a waste of resources and existing potential, can become a burden on family and community problems, the main source of poverty, can encourage increased social unrest and crime and can hinder development. Did inflation and GRDP affect open unemployment in Maluku Province in 2011-2017. This study aims to analyze inflation and GDP against open unemployment in Maluku Province in 2011-2017. The data used is in the form of secondary data obtained from the Central Statistics Agency of Maluku Province. The variables measured are inflation and GRDP as independent variables and Open Unemployment as bound variables. The analysis technique used is the Data Panel. The results showed that the inflation variable had a negative and significant effect on open unemployment in Maluku Province with a sig. 0.0278 and GRDP has a negative and significant effect of 0.0385 on open unemployment in Maluku Province. Taken together, the inflation and GRDP variables have a significant effect on open unemployment in Maluku Province, this can be seen from the F test with a sig. 0.000000. This study explains that the inflation and GRDP variables have a big influence on open unemployment in Maluku Province.

Kata Kunci : Inflation, GRDP, Open Unemployment and Panel Data.

JEL Classification : E31, F43, E24, C23

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 2000). Oleh karenanya, pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan perkapita, namun harus pula melihat bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada penduduk dan mengetahui siapa yang mendapat manfaat dari pembangunan tersebut. Pertumbuhan ekonomi belum dapat dikatakan berhasil jika beban sosial semakin berat, pengangguran semakin meningkat, distribusi pendapatan tidak merata dan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan juga semakin meningkat. Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian, salah satu diantaranya dari tingkat pengangguran. Melalui tingkat pengangguran kita dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat serta tingkat distribusi pendapatan. Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak

diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang disebabkan karena rendahnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dijelaskan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). Dalam pelaksanaan RPJM Nasional, dikenal adanya strategi pokok pembangunan yang salah satunya mengenai strategi pembangunan Indonesia. Sasaran pokok dari strategi pembangunan Indonesia adalah untuk pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Hak-hak dasar yang dimaksudkan adalah dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, rasa takut dan kebebasan mengemukakan pendapatnya dan memperoleh prioritas untuk diwujudkan. Hak-hak dasar tersebut selama ini telah terabaikan dan hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses pembangunan yang berjalan padahal hak-hak dasar tersebut secara jelas diamanatkan oleh konstitusi. Tanpa pemenuhan hak dasar akan sulit diharapkan partisipasi pada kebebasan dan persamaan.

Pada UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang baru-baru ini diperbincangkan yang

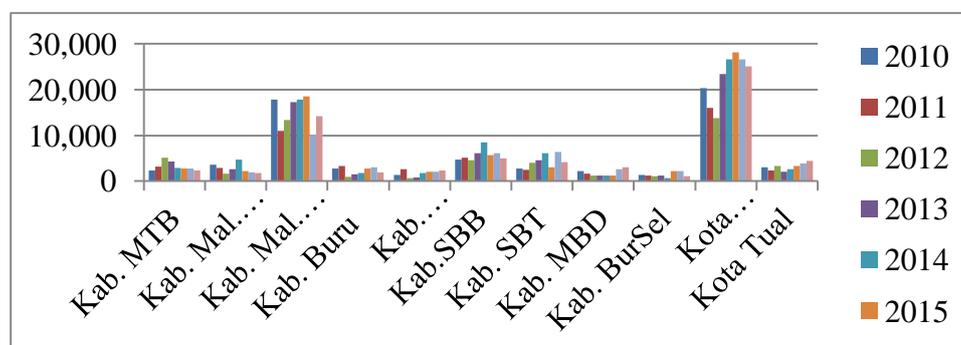
menyinggung masalah buruh, dijelaskan mengenai pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Untuk itu diperlukan adanya agenda dalam melaksanakan rencana program pembangunan tersebut yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari adanya program ini antara lain: penciptaan lapangan kerja yang memadai untuk mengurangi pengangguran, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya alam serta perbaikan infrastruktur.

Pembangunan di Provinsi Maluku yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Maluku yang diperoleh dari BPS pada tahun 2015 tumbuh sebesar 5,48%. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan

masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 11 kabupaten/kota di Maluku yang tidak terlepas dari usaha keras secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Potensi wilayah dan kekayaan alam dapat dilihat sebagai keunggulan komparatif bagi daerah, namun di sisi lain berbagai kendala seperti sumber daya manusia dan sumber modal untuk memanfaatkan potensi tersebut masih dihadapi oleh penentu kebijakan baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat daerah kabupaten/kota. Akibatnya kondisi perekonomian masyarakat secara umum belum mencapai tingkat pemerataan pendapatan yang sama dan masih ditemui kekurangan, diantaranya adalah masalah pengangguran sebagai penghambat dalam pencapaian tingkat perekonomian.

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang saat ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan. Jumlah penganggur mengalami peningkatan. Sebaliknya pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, dapat menjadi beban masalah keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong meningkatnya keresahan sosial dan kriminalitas serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang (Depnakertrans, 2004). Meningkatnya angka pengangguran disebabkan karena ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja. Adanya kesenjangan antara angkatan kerja dan lapangan kerja tersebut akan berdampak terhadap perpindahan tenaga kerja (migrasi) baik secara spasial antara desa-kota maupun secara sektoral. Hal ini sejalan dengan pernyataan Todaro (2000) yang menjelaskan bahwa terjadinya perpindahan penduduk disebabkan oleh tingginya upah atau pendapatan yang dapat diperoleh di daerah tujuan. Kesenjangan upah atau pendapatan yang besar antara desa atau kota mendorong penduduk desa atau daerah untuk datang dan mencari pekerjaan di kota.



Sumber: BPS Kabupaten/Kota Provinsi Maluku, (diolah).

Gambar (1) Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2010-2017

Berdasarkan gambar (1) diatas dapat dilihat secara umum bahwa pengangguran terbuka yang terjadi di Kabupaten dan Kota Provinsi Maluku dari tahun 2010-2017 menunjukkan angka yang naik turun dari masing-masing Kabupaten/Kota. Pengangguran tertinggi berada di tahun 2015 yaitu berada di Kota Ambon dengan jumlah 28,130 jiwa dan pengangguran terendah di Kabupaten MBD dengan jumlah 1,240 jiwa. Berdasarkan dari data diatas dapat dilihat bahwa kondisi pengangguran terbuka pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku cenderung mengalami peningkatan.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya pengangguran terbuka merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001). Di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku besarnya pengangguran terbuka bergerak secara naik turun, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Pada hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan

bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. Menurut Esmara (dikutip dari Prasetyo, Tri Bambang, 2008) dalam ilmu ekonomi dikemukakan berbagai teori yang membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani untuk mengejar keterbelakangan. Sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat.

Pada awal tahun 1970, para ahli ekonomi mulai meragukan manfaat pertumbuhan pendapatan nasional dalam pembangunan ekonomi sebab di banyak negara berkembang terdapat gejala adanya kemiskinan, ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pengangguran yang cenderung meningkat walaupun pendapatan nasional mengalami peningkatan secara stabil. Pemmasalahan dan tantangan pembangunan daerah lima tahun ke depan masih diprioritaskan pada masalah-masalah sosial yang mendasar antara lain besarnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Tabel (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku 2010-2017

Tahun	PDRB (Rp)	Laju Pertumbuhan PDRB
2010	18428584.56	-
2011	19,597,390.14	6.34%
2012	20,999,888.81	7.16%
2013	22,108,887.72	5.28%
2014	23,506,736.02	6.32%
2015	24,861,708.32	5.76%
2016	26,297,790.51	5.78%
2017	27,812,670.36	5.76%

Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. PDRB merupakan salah

satu indikator penting untuk mengetahui peranan dan potensi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu.

Peran daerah dalam mendukung perekonomian nasional cukup besar namun terkadang tidak sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional, peran tersebut menjadi beban optimal. Fenomena perekonomian saat ini cenderung menuntut adanya peran aktif dari para eksekutif untuk lebih banyak menggali

potensi perekonomian daerahnya serta memainkan peranan yang lebih besar dalam merangsang aktivitas ekonomi daerah.

Tabel (2) Tingkat Inflasi di Provinsi Maluku Tahun 2010-2017

Tahun	Inflasi (%)
2010	8,78
2011	2,85
2012	6,73
2013	8,81
2014	6,81
2015	5,92
2016	3,02
2017	-0,05

Sumber: BPS Provinsi Maluku.

Berdasarkan tabel (3) di atas dapat dilihat bahwa laju inflasi di Provinsi Maluku periode 2010-2017 masih sangat fluktuatif. pada tahun 2017 tingkat inflasi berada pada angka -0,05%. Dan inflasi tertinggi tahun 2013. Inflasi yang tinggi terutama adalah kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi dan berlipat gandanya penerimaan minyak akibat peningkatan harga minyak pada pasaran dunia.

Pengangguran merupakan salah satu tolok ukur sosio ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya pengangguran. Pengangguran yang ada di Provinsi Maluku hingga tahun 2017 menunjukkan jumlah penduduk yang tergolong penganggur masih cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum maksimalnya kebijakan pemerintah Maluku dalam menanggulangi masalah pengangguran. Diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran seperti inflasi dan produk domestik regional bruto (PDRB) dapat meminimalisir pengangguran yang terjadi di Maluku. Dari fenomena inilah yang mendorong peneliti untuk mengamati lebih lanjut tentang "Pengaruh Inflasi dan PDRB terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten/Kota)".

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Pengangguran

Terbuka di Provinsi Maluku.

2. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku.
3. Apakah Inflasi dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku.
2. Pengaruh PDRB terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku.
3. Pengaruh Inflasi dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku.

LANDASAN TEORITIS

Tenaga Kerja

Sumber daya manusia mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan seorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang atau jasa. Pengertian kedua dari sumber daya yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut, artinya mampu melaksanakan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis yaitu dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi masyarakat (Simanjuntak, Payaman, 2001).

Sumber daya manusia atau sering disebut dengan *human resources* merupakan penduduk secara keseluruhan. Dari segi penduduk sebagai faktor produksi, maka tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi, hanya penduduk yang berupa tenaga kerja (*man power*) yang dapat dianggap sebagai faktor produksi. Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan dan yang sedang melakukan kegiatan lain seperti: bersekolah dan mengurus rumah tangga (Simanjuntak, Payaman 2001). Menurut BPS, di Indonesia digunakan penetapan umur maksimal berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk yang sudah bekerja atau mencari pekerjaan.

Menurut (Simanjuntak, Payaman 2001), konsep dari tenaga kerja adalah terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja ini terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Golongan yang bekerja merupakan sebagian masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya tergolong siap bekerja dan sedang mencari pekerjaan termasuk di dalam golongan menganggur.

Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja atau bisa dikatakan sebagai dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan produksi. Kelompok bukan angkatan ini terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain yang menerima pendapatan.

Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) memberikan pengertian dan definisi terhadap konsep ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Penduduk

Penduduk adalah semua orang Indonesia yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

2. Umur

Umur seseorang dapat diketahui bila tanggal, bulan dan tahun kelahiran diketahui. Penghitungan umur menggunakan pembulatan ke bawah atau umur menurut ulang tahun terakhir. Umur dinyatakan dalam kalender masehi.

3. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.

4. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti menunggu panen, pegawai yang sedang cuti dan sejenisnya. Selain itu, juga termasuk angkatan kerja adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari dan orang yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai bekerja atau dengan kata lain menganggur.

5. Bekerja

Bekerja di definisikan sebagai kegiatan ekonomi dengan menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keberuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak di bayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

6. Sementara tidak bekerja

Sementara tidak bekerja adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam, seperti:

- Pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, perusahaan menghentikan kegiatan sementara (misalnya kerusakan mesin, dan lain-lain).
- Petani-petani yang mengusahakan gabah pertanian sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu masa panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah dan sebagainya.

7. Pengangguran Terbuka Pengangguran terbuka meliputi:

- Penduduk yang sedang mencari pekerjaan.
- Penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha.
- Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan

8. Mencari pekerjaan

Mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode waktu.

9. Mempersiapkan usaha

Mempersiapkan usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tidak dibayar.

10. Setengah penganggur

Setengah penganggur adalah penduduk usia kerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau kurang dari jam kerja normal.

11. Setengah penganggur terpaksa

Setengah penganggur terpaksa adalah penduduk

- usia kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu dan masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara mencari pekerjaan dan atau mempersiapkan usaha.
12. Setengah penganggur sukarela
Setengah penganggur sukarela adalah penduduk usia kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu dan tidak mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.
13. Bukan angkatan kerja
Bukan angkatan kerja adalah kelompok penduduk yang selama seminggu yang lalu mempunyai kegiatan yang tidak termasuk dalam angkatan kerja seperti:
- Sekolah, yaitu mereka yang kegiatannya dirumah.
 - Mengurus rumah tangga, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah.
 - Lainnya, yaitu mereka yang sudah tidak dapat melakukan kegiatan seperti yang termasuk dalam kategori sebelumnya, seperti sudah lanjut usia, cacat jasmani, cacat mental atau lainnya.
14. Pekerjaan penuh waktu (*Full Time*)
Pekerjaan penuh waktu adalah pekerjaan yang hanya dilakukan sesuai dengan jam kerja yang berlaku ditempat bekerja dan biasanya merupakan pekerjaan utama.
15. Pekerjaan Paruh waktu (*Part Time*)
Pekerjaan paruh waktu adalah pekerjaan yang hanya dilakukan pada sebagian waktu dari jam kerja normal yang berlaku di tempat kerja.
16. Lapangan usaha
Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja, meliputi:
- a. Pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan.
 - b. Pertambangan dan penggalian.
 - c. Industri pengolahan.
 - d. Listrik, gas dan air.
 - e. Konstruksi.
 - f. Perdagangan, rumah makan dan hotel.
 - g. Angkutan, pergudangan dan komunikasi.
 - h. Keuangan, asuransi dan usaha persewaan bangunan.
 - i. Jasa-jasa kemasyarakatan, social dan perorangan lainnya.
17. Jenis pekerjaan
Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh seseorang yang bekerja yang di bagi dalam 8 golongan besar yaitu:
- a. Tenaga profesional.
 - b. Kepemimpinan dan ketatalaksanaan.
 - c. Pejabat pelaksana dan tenaga tata usaha.
 - d. Tenaga usaha penjualan.
 - e. Tenaga usaha jasa.
 - f. Tenaga usaha pertanian.
 - g. Tenaga produksi dan lainnya (operator alat angkutan, tenaga kasar dll).
18. Status pekerjaan
Status pekerjaan adalah status kegiatan usaha seseorang yang sedang bekerja, meliputi:
- a. Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain.
 - b. Berusaha dibantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap.
 - c. Berusaha dibantu buruh tetap.
 - d. Buruh/karyawan/pekerja dibayar

Pemintaan Tenaga Kerja

Pemintaan adalah jumlah suatu komoditi yang tersedia dibeli individu selama periode waktu tertentu yang besarnya di pengaruhi oleh harga komoditi, pendapatan nominal, harga komoditi lain dan cita rasa. Permintaan terhadap tenaga kerja merupakan sebuah daftar sebagai alternatif kombinasi tenaga kerja dan input lainnya yang tersedia yang berhubungan dengan tingkat upah.

Menurut Ade Heryani, 2009, permintaan akan tenaga kerja berasal dari pihak dunia usaha. Orang berusaha sendiri atau ada orang lain yang membutuhkan dan memperkerjakan. Ada akan permintaan tenaga kerja karena ada permintaan akan barang atau jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja itu. Permintaan para produsen akan faktor produksi tenaga kerja tergantung dari permintaan masyarakat akan hasil produksi.

Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran adalah jumlah komoditi yang tersedia ditawarkan oleh produsen selama periode waktu tertentu dan dipengaruhi oleh harga komoditi itu sendiri dan biaya yang dikeluarkan. Penawaran terhadap tenaga kerja merupakan hubungan antara tingkat upah dan jumlah satuan tenaga kerja yang tersedia ditawarkan oleh *supplier* (Aisyah, Dede 2006).

Sebuah kurva penawaran tenaga kerja menggambarkan kombinasi terhadap kuantitas tenaga kerja yang ditawarkan dengan kombinasi tingkat upah tertentu. Dengan kata lain, kurva penawaran tenaga kerja

merupakan kombinasi dari berbagai kemungkinan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan pada berbagai tingkat upah yang ditawarkan pada berbagai tingkat upah tertentu yang berlaku.

Pengangguran Terbuka

Menurut Sumarsono, Sony 2003 Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan menurut Triyanto 1990, Pengangguran terbuka yaitu angkatan kerja yang belum bekerja karena belum mendapatkannya.

Menurut BPS, Pengangguran terbuka terdiri atas:

1. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan.
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha.
3. Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan

Menurut (Sumarsono, 2003) bentuk-bentuk pengangguran dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Pengangguran Friksional

Pengangguran Friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Dimana kesulitan temporer ini dapat berupa berbentuk waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi atau terjadi karena faktor jarak dan kurangnya informasi. Selama proses demikian, seorang pelamar yang menunggu panggilan untuk seleksi atau ujian masuk (yang belum pasti akan diterima) adalah tergolong pengangguran friksional. Menurut Mankiw (2003), pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan para pencari kerja untuk mencocokkan antara kualifikasi yang dimiliki dengan lowongan pekerjaan yang tersedia, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan tersebut dikatakan pengangguran friksional. Menurut Sukimo (2003) secara teori pengangguran sebesar 2-3 persen dari jumlah tenaga kerja, maka ekonomi sudah dipandang telah mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak 2-3 persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para pengangguran ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik dalam proses mencari kerja baru tersebut untuk sementara para pekerja tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.

b. Pengangguran Struktural

Pengangguran Struktural terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian. Dimana dengan perubahan struktur tersebut memerlukan perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru tersebut. Bentuk penganggur struktur lain adalah terjadinya pengurangan pekerja akibat penggunaan alat-alat dan teknologi maju. Penganggur sebagai akibat perubahan struktur perekonomian pada dasarnya memerlukan tambahan latihan untuk memperoleh keterampilan baru yang sesuai dengan permintaan dan teknologi baru.

c. Pengangguran Musiman

Pengangguran Musiman terjadi karena pergantian musim. Diluar musim panen dan turun ke sawah, banyak orang yang mempunyai kegiatan ekonomis, mereka hanya sekedar menunggu musim musim yang baru. Selama masa menunggu tersebut mereka digolongkan sebagai penganggur musiman.

d. Pengangguran Terpaksa dan Pengangguran Sukarela

Pada tingkat keseimbangan yang diciptakan oleh pasar kompetitif perusahaan-perusahaan akan mau mempekerjakan semua pekerja yang memenuhi kualifikasi dan mau bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Pengangguran yang terjadi jika ada pekerjaan yang tersedia, tetapi orang yang menganggur tidak bersedia menerima pada tingkat upah yang berlaku untuk pekerjaan tersebut disebut pengangguran sukarela.

Menurut BPS, terjadinya pengangguran dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pengangguran Terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.
2. Setengah Pengangguran adalah seseorang yang selama periode tertentu bekerja kurang dari jam kerja normal. Dalam hal ini, jam kerja normal ditetapkan sebanyak 35 jam per minggu.
3. Setengah Pengangguran Terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh/karyawan dan pekerja mandiri (berusaha sendiri) yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia menerima pekerjaan lain/tambahan.

Didalam penelitian ini pengangguran yang dipakai adalah pengangguran terbuka, karena tenaga kerja ini adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan

sedang mencari pekerjaan. Sedangkan setengah penganggur dan setengah penganggur terpaksa merupakan tenaga kerja yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi mereka masih dalam proses mencari.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Peningkatan nilai tambah dari suatu bahan baku (input) menjadi produk (output) menunjukkan adanya perkembangan perekonomian suatu wilayah. Dalam statistik neraca nasional, perkembangan nilai tambah yang diciptakan oleh berbagai sektor ekonomi seperti sektor pertanian, sektor industri pengolahan, jasa-jasa dll, dicatat dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto. Dengan demikian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh nilai tambah (*value added*) produksi barang dan jasa dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. (Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku 2016).

Produk regional merupakan produk domestik setelah ditambah pendapatan yang mengalir ke dalam daerah/wilayah tersebut, kemudian dikurangi pendapatan yang mengalir ke luar daerah/wilayah. Atau dapat dikatakan bahwa produk regional merupakan produk yang betul-betul dihasilkan oleh faktor-faktor produksi (tenaga kerja, tanah, modal, *entrepreneur*) yang dimiliki penduduk daerah/wilayah yang bersangkutan. Namun karena masih terbatasnya data untuk memantau pendapatan yang mengalir dari/ke luar suatu daerah/wilayah, maka antara produk domestik dengan produk regional sampai saat ini diasumsikan sama. (Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku 2016).

Manfaat Perhitungan PDRB

1. Untuk bahan evaluasi pembangunan di masa lalu secara keseluruhan.
2. Untuk bahan umpan balik terhadap perancangan pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Untuk dasar pembuatan proyeksi perkembangan perekonomian di masa yang akan datang.
4. Untuk memantau perkembangan inflasi berdasarkan perubahan harga.
5. Untuk membandingkan peranan masing-masing sektor di wilayah.
6. Jika perhitungan PDRB dihubungkan dengan banyak tenaga kerja, maka dapat mencerminkan produktivitas tenaga kerja masing-masing sektor.
7. Untuk bahan perencanaan investasi di masa yang akan

datang.

Metode Perhitungan PDRB

PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) atau *at current nominal prices* yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu wilayah yang menghasilkan output pada suatu periode yang dinilai atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat struktur perekonomian atau peranan setiap sektor dan gambaran perekonomian pada tahun berjalan. PDRB atas dasar harga konstan atau *at constant prices* digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah baik secara keseluruhan maupun sektoral.

Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut BPS Provinsi Maluku (2016), PDRB atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan nilai tambah bruto (*gross value added*) dari seluruh sektor perekonomian di dalam suatu daerah/wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun. Nilai tambah adalah selisih nilai produksi (*output*) dengan biaya antara (*intermediate input*). Nilai Tambah Bruto (NTB) mencakup komponen faktor produksi; upah dan gaji, bunga, modal, sewa tanah, keuntungan, penyusutan, serta pajak tak langsung neto. Faktor pendapatan adalah merupakan balas jasa faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja (*labour*), modal (*capital*), tanah (*land*), managerial (*entrepreneur*). Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat dihitung melalui dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang dimaksud metode langsung adalah metode perhitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah. Perhitungan dengan metode langsung dapat dilakukan dengan 3 (tiga) macam pendekatan yaitu:

1. Metode Langsung

a. Pendekatan Produksi. Pendekatan dari sisi produksi adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap-tiap sektor atau sub sektor. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam

proses produksi dengan demikian nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi.

b. Pendekatan Pendapatan. Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang termasuk dalam surplus usaha disini adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan.

c. Pendekatan Pengeluaran. Pendekatan pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa. Nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang membentuk produk domestik regional. Pengeluaran akhir/pemintaan akhir adalah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba/lembaga yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor) di dalam suatu daerah/wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung merupakan perhitungan dengan cara menggunakan data yang bersumber dari luar daerah/wilayah yang bersangkutan, seperti dengan cara alokasi yaitu mengalokir PDB Nasional menjadi PDRB Provinsi dengan menggunakan beberapa indikator produksi dan atau indikator lainnya yang cocok sebagai alokator. Perkiraan dilakukan berdasarkan alokasi dengan mengalokasikan data tersebut ke daerah yang bersangkutan, yaitu menggunakan alokator yang cocok dengan sektor/kegiatan masing-masing.

Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010

Menurut BPS Provinsi Maluku (2016), ada empat cara yang digunakan untuk menghitung Nilai Tambah Bruto (NTB) atas dasar harga konstan 2010, yaitu:

1. **Revaluasi.** Metode ini dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun

dengan harga pada tahun dasar 2010. Hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar harga konstan 2010. Selanjutnya NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari harga selisih antara output dan biaya antara. Dalam prakteknya, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan karena mencakup komponen input yang sangat banyak. Selain itu, data harga yang tersedia juga tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu, biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan masing-masing tahun dengan rasio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

2. **Ekstrapolasi.** Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2010 dengan indeks produksi. Indeks produksi yang digunakan sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi, misalnya tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan lainnya yang dianggap cocok dengan jenis kegiatan yang dihitung. Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap perhitungan output atas dasar harga konstan. Kemudian dengan menggunakan rasio tetap nilai tambah terhadap output akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

3. **Deflasi.** Nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahun dengan indeks harga. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPPB), dan sebagainya. Indeks-indeks harga di atas dapat pula digunakan sebagai inflator dalam keadaan dimana nilai tambah atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

4. **Deflasi Berganda.** Dalam deflasi berganda, komponen yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya. Sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk perhitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan indeks harga produsen atau indeks perdagangan besar sesuai dengan cakupan komoditinya. Sedangkan, indeks untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar. Kenyataannya, sangat sulit melakukan deflasi terhadap

biaya antara. Hal tersebut karena komponennya banyak dan indeks harga belum tersedia secara baik. Oleh karena itu, metode deflasi berganda ini belum banyak digunakan dalam perhitungan PDRB atas dasar harga konstan.

Inflasi

Salah satu peristiwa modern yang sangat penting dan yang selalu dijumpai di hampir semua negara di dunia adalah inflasi. Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus (Mankiw, 2003). Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan presentase yang sama. Mungkin kenaikan tersebut dapat terjadi tidak bersamaan, yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi sekali saja meskipun dalam presentase yang besar, bukanlah merupakan inflasi.

Penggolongan Inflasi

Inflasi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu (Boediono, 1999):

- a) Inflasi Ringan : < 10 % per tahun
- b) Inflasi Sedang : 10 – 30 % per tahun
- c) Inflasi Berat : 30 -100 % per tahun
- d) Hiperinflasi : 2 100 % per tahun

Menentukan Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi digunakan untuk menggambarkan perubahan-perubahan harga-harga yang berlaku dari satu periode ke periode lainnya. Untuk menentukannya perlu diperhatikan data indeks harga konsumen dari satu periode tertentu dan seterusnya dibandingkan dengan indeks harga pada periode sebelumnya. Rumus yang dipakai untuk menentukan laju inflasi adalah sebagai berikut (Suharyadi dan Purwanto, 2003):

$$\Pi = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100$$

dimana:

Π : Laju Inflasi

IHK_t : Indeks Harga Konsumen periode ke t

IHK_{t-1} : Indeks Harga Konsumen periode ke t-1 (periode lalu)

Jenis-Jenis Inflasi

Berdasarkan sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi dibedakan dalam dua spesifikasi yaitu dilihat dari sebab awal inflasi dan ditinjau dari asal inflasi, yang dijabarkan sebagai berikut (Sukirno, 2003).

Inflasi dilihat dari sebab awalnya:

1) Demand-Pull Inflation

Demand-pull Inflation disebabkan oleh permintaan masyarakat akan barang-barang (*aggregate demand*) bertambah. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian yang berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Selain pada masa perekonomian berkembang pesat, *Demand-pull Inflation* juga dapat berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus menerus. Dalam masa seperti ini pemerintah berbelanja jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk membiayai kelebihan pengeluaran tersebut pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut menyediakan barang dan jasa. Maka keadaan ini akan mewujudkan inflasi.

2) Cost Push Inflation

Inflasi jenis *Cost-Push inflation* terjadi karena kenaikan biaya produksi, yang disebabkan oleh terdepresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara membenarkan gaji atau upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

Pengaruh Inflasi Terhadap Pengangguran

Berbagai studi telah dilakukan untuk mengkaji hubungan antara inflasi dan pengangguran. Studi yang umum telah dibahas dalam kajian hubungan ini adalah teori yang dikenal dengan kurva Phillips. Teori yang mengkaji hubungan antara pengangguran dan inflasi pertama kali dilakukan oleh A. W Phillips dari *London School of Economic* pada tahun 1958, dengan dasar teorinya yang sering dikenal sebagai kurva Phillips. Dengan berdasarkan data empiris, teori Phillips tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pertumbuhan upah nominal dan tingkat pengangguran. Hubungan diantara kedua peubah tersebut terlihat stabil. Untuk tujuan membuat Kurva Phillips ini, dasar teori kurva Phillips pertama berdasarkan teori pasar tenaga kerja yang diuji berdasarkan data empiris perekonomian di Inggris dari tahun 1861-1957. Latar belakang timbulnya teori ini karena adanya keraguan terhadap masalah pokok dan implikasi kebijakan makro ekonomi pada tahun 1950-an, yang ingin mencapai secara serentak kestabilan harga serta kesempatan kerja yang tinggi (penuh). Dasar teori pertama diketemukan adanya hubungan yang negatif antara persentase tingkat upah dengan tingkat persentase pengangguran yang kemudian kurva ini lebih dikenal dengan sebagai Kurva Phillips, sesuai dengan nama penemunya, dan selanjutnya Kurva Phillips ini dikenal sebagai Kurva Phillips Pertama.

Pada gambar Kurva Philips pertama, tingkat pengangguran alamiah (*natural rate of unemployment*) ini digambarkan sebagai perpotongan antara Kurva Phillips dengan sumbu horisontal. Dimana, *natural rate of unemployment* (UN) merupakan tingkat pengangguran dalam mana terdapat kestabilan upah ($W = 0$). Dasar teori ini yang kemudian dikembangkan oleh para ahli ekonomi berikutnya. Misal, analisis Lipsey mengenai Kurva Phillips dengan menggambarkan teori pasar tenaga kerja mulai dengan dua pertanyaan: pertama, penawaran dan permintaan akan tenaga kerja menentukan tingkat upah, kedua laju perubahan tingkat upah ditentukan oleh kelebihan permintaan akan tenaga kerja. Jika semakin besar kelebihan permintaan akan tenaga kerja, maka tingkat perubahan upah juga semakin besar. Sedangkan kelebihan permintaan mempunyai hubungan negatif dengan tingkat pengangguran. Selanjutnya, makin besar kelebihan permintaan akan tenaga kerja, pengangguran cenderung makin kecil. Dari hubungan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa tingkat upah mempunyai hubungan terbalik (negatif) dengan tingkat pengangguran. Artinya, makin besar tingkat pengangguran, maka tingkat

pengangguran upah makin kecil. Hubungan seperti inilah yang tercermin dalam kurva Phillips pertama.

Dasar teori keduanya (pembaharuan), yakni berdasarkan pendekatan harga harapan (*rational expectation*), yang kemudian variabel upah diganti dengan variabel tingkat harga dan kemudian tingkat harga diganti dengan tingkat inflasi. Pada akhirnya dasar teori kedua ini menemukan adanya hubungan yang negatif antara tingkat inflasi dengan tingkat persentase pengangguran, yang selanjutnya kurva Phillips ini sering dikenal dengan kurva Phillips kedua (lihat gambar 2). Ketika terjadi depresi di Amerika Serikat tahun 1929, terjadi inflasi yang lebih tinggi dan diikuti dengan pengangguran yang lebih tinggi pula. Berdasarkan data tersebutlah A.W. Phillips mengamati hubungan antara inflasi dengan pengangguran. Dari hasil pengamatannya tersebut, ternyata ada kaitan erat antara inflasi dengan tingkat pengangguran, dalam arti jika inflasi tinggi, maka tingkat pengangguran akan rendah. Hasil pengamatan Phillips ini dikenal dengan kurva Phillips hingga sekarang. Selanjutnya, kurva Phillips tidak lagi dibedakan kurva Phillips pertama atau kedua, namun lebih dibedakan kurva Phillips jangka pendek maupun kurva Phillips jangka panjang (Prasetyo, Eko 2009).

Pengaruh Tingkat PDRB Terhadap Pengangguran

Hubungan antara tingkat PDRB yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran diungkapkan oleh George Mankiw. Hal ini didasarkan pada Hukum Okun, yang menguji hubungan antara tingkat pengangguran dengan besarnya PDRB suatu daerah.

Seorang ahli ekonomi Okun memperkenalkan Hukum Okun yang menyatakan bahwa terdapat kaitan yang erat antara tingkat pengangguran dengan GDP riil, dimana terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dengan GDP. Pada kurva Okun terdapat garis sumbu horizontal yang menunjukkan persentase GDP riil dan perubahan tingkat pengangguran pada sumbu vertikal. Hal ini jelas menunjukkan bahwa perubahan dalam tingkat pengangguran tahun ke tahun sangat erat hubungannya dengan perubahan dalam GDP riil tahun ke tahun. Setiap adanya peningkatan terhadap persentase pengangguran dalam suatu daerah, maka hal tersebut akan setara dengan terjadinya penurunan besarnya PDRB sebesar 2 persen. Apabila PDRB suatu daerah turun, maka produksinya juga turun, artinya tingkat produksi yang ada di daerah tersebut turun diakibatkan oleh konsumsi yang turun dari masyarakat dan juga tenaga

kerja yang digunakan juga akan turun, akibat dari berkurangnya produksi perusahaan.

Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 2002).

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan untuk menjawab tujuan penelitian yang dinyatakan bahwa semua variabel berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Maluku yang kemudian dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Diduga bahwa ada pengaruh negatif inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku.
2. Diduga bahwa ada pengaruh negatif PDRB terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku.
3. Diduga bahwa ada pengaruh Inflasi dan PDRB secara bersama-sama terhadap pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa *pooled data*, dengan periode pengamatan tahun 2011-2017 tiap kabupaten/kota di Provinsi Maluku. *Pooled data* adalah sekelompok data individu yang diteliti selama rentan waktu tertentu. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku. Data sekunder yang digunakan untuk melengkapi data peneliti yaitu laporan Maluku Dalam Angka yang berupa realisasi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha serta data inflasi dan pengangguran dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Maluku dari tahun 2011-2017. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam mengambil sampel adalah *Non Probability Sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*.

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang

mengeluarkan laporan keuangan dan perekonomian dari tahun 2011-2017.

- b. Kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang bukan merupakan hasil pemekaran wilayah dari tahun 2011-2017.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah model analisis regresi panel data dengan bantuan *software Eviews ver 9*, dan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen, maka digunakan uji statistik.

Pemilihan Model Regresi

Penelitian ini menggunakan regresi data panel dalam menganalisa pengaruh sektor basis dan sektor non basis terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Beberapa hal yang akan dihadapi saat menggunakan data panel adalah koefisien *Slope* dan intersep yang berbeda pada setiap antar ruang dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, asumsi intersep, *slope*, dan *error*-nya perlu dipahami karena ada beberapa kemungkinan yang akan muncul, beberapa kemungkinan tersebut menunjukkan bahwa semakin kompleks estimasi parameternya sehingga diperlukan beberapa metode untuk melakukan estimasi parameternya, seperti pendekatan *common effect*, *fixed effect*, dan *random effects* (Widarjono, 2013). Dari ketiga teknik estimasi tersebut akan dipilih salah satu teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel. Pemilihan tersebut didasarkan atas uji-uji sebagai berikut:

➤ Uji Chow (Uji Likelihood)

Pengujian yang pertama adalah untuk memilih teknik analisis yang akan digunakan paling baik di antara model *fixed effect* dan *Ordinary Least Square*. Untuk melakukan pengujian tersebut, peneliti akan menggunakan uji signifikansi *fixed effect* yang disebut sebagai Uji Chow. Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara *P-value* dengan $\alpha = 5$ persen. Hipotesis yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : model *common effect*

H_1 : model *fixed effect*

Apabila $P\text{-value} > \alpha = 5$ persen, maka H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa model *common effect* lebih baik dari pada model *fixed effect*. Sebaliknya apabila $P\text{-value} < \alpha = 5$ persen, maka H_0 ditolak dan dapat disimpulkan

bahwa model *fixed effect* lebih baik dari pada model *common effect*.

➤ Uji Hausman

Pengujian berikutnya yang dilakukan adalah untuk memilih teknik analisis yang paling baik di antara model *random effect* dan model *fixed effect* untuk digunakan dalam pengujian regresi. Untuk melakukan pengujian tersebut, peneliti akan melakukan uji Hausman. Pelaksanaan uji Hausman dapat dilakukan dengan fasilitas *software Eviews 9*. Dari hasil uji Hausman ini nanti akan dilihat nilai probabilitasnya. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *Random Effect*

H_a : Model *Fixed Effect*

Pada aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini (*eviews 9*), apabila nilai *p-value* signifikan ($P\text{-value} < \alpha$), maka H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa model yang lebih baik adalah *fixed effect*, sebaliknya apabila nilai *p-value* signifikan ($P\text{-value} > \alpha$), maka H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa model yang lebih baik adalah *random effect*.

➤ Uji Lagrange Multiplier (LM)

Apabila dari kedua pengujian sebelumnya didapatkan hasil pada salah satu pengujian atau bahkan kedua pengujian ada yang menerima H_0 , selanjutnya dilakukan pengujian yang dinamakan Uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang disebut juga *Breusch - Pagan Random Effect*. Namun, jika hal tersebut tidak terjadi, maka pengujian ini tidak perlu untuk dilakukan. Pengujian ini dilakukan untuk memilih teknik analisis yang akan digunakan paling baik di antara model *common effect* dan model *random effect*. Hipotesa yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *Common Effect*

H_a : Model *Random Effect*

Hasil uji *Lagrange Multiplier* akan dilihat nilai statistik *chi-squares* hasil olahan data *eviews*. Apabila nilai dari uji *Lagrange Multiplier* nilainya lebih besar daripada nilai kritis statistik *chi-squares*, maka H_0 ditolak. Dengan kata lain akan digunakan model *random effect* karena dianggap lebih baik. Apabila nilai dari hasil Uji *Lagrange Multiplier* berada dibawah nilai kritis statistik *chi-square*, maka H_0 diterima. Jika H_0 diterima maka dapat diambil kesimpulan lebih baik menggunakan model *random effect*.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*) dengan menggunakan program *Eviews 9*. Analisis Regresi linier berganda digunakan untuk menyatakan pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen penelitian. Model dalam penelitian ini adalah:

$$PT = \beta_0 + \beta_1 INF_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

PT = Pengangguran Terbuka

INF = Inflasi

PDRB = Pertumbuhan Ekonomi

β_0 = Konstanta

i = Jumlah Kab/Kota di Provinsi Maluku (11 Kab/Kota).

t = Tahun Penelitian

ε_{it} = Variabel error dalam model penelitian.

Untuk menguji ketepatan model regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dengan menggunakan uji koefisien determinasi (*adjusted R²*), uji statistik F, dan uji statistik T.

Uji Koefisien Determinasi (*adjusted R²*)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda Koefisien determinasi (*adjusted R²*) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Gujarati, 2006). Nilai kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai *adjusted R²* yang mendekati satu berarti menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen dan bila *adjusted R²* mendekati nol, maka semakin lemah variabel independen menerangkan variabel dependen terbatas.

Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F)

Model regresi penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian telah layak untuk dilanjutkan pengujian selanjutnya. Menurut Ghozali (2013) dengan tingkat signifikan 5 persen, kriteria pengujianya:

- 1) Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ atau probabilitas > 5 persen, maka variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ atau probabilitas < 5 persen, maka variabel independen berpengaruh secara

signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Hipotesis (Uji Statistik T)

Uji hipotesis (Uji statistik T), uji ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh variabel penjelas atau independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara P-value dengan $\alpha = 5$ persen. Apabila P-value $< \alpha = 5$ persen, maka hipotesis alternatif yang menyatakan suatu variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen dapat diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Namun jika P-value $> \alpha = 5$ persen, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi α sebesar 5 persen.

Uji Asumsi Klasik

Kelebihan penelitian menggunakan data panel adalah data yang digunakan menjadi lebih informatif, variabilitasnya lebih besar, kolinearitas yang lebih rendah diantara variabel dan banyak derajat bebas (*degree of freedom*) dan lebih efisien (Gujarati 2006). Panel data dapat mendeteksi dan mengukur dampak dengan lebih baik dimana hal ini tidak bisa dilakukan dengan metode *cross section* maupun *time series*.

Panel data memungkinkan mempelajari lebih kompleks mengenai perilaku yang ada dalam model sehingga pengujian data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik (Gujarati 2006). Dengan keunggulan regresi data panel, maka implikasinya tidak harus dilakukannya pengujian asumsi klasik dalam model data panel (Gujarati, 2006, dalam Shochrul R, Ajija, dkk. 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Pengangguran Terbuka

Permasalahan yang timbul akibat tingginya jumlah penduduk salah satunya adalah pengangguran. Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukimo, 2003). Pengangguran terjadi karena pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang ada. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya ketidakseimbangan pasar tenaga kerja tersebut adalah ketidakcocokan keinginan atau kebutuhan antara pasar tenaga kerja dengan pengguna tenaga kerja. Selain itu faktor-faktor yang mungkin jadi penyebab tingginya pengangguran adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan.

Tingkat pengangguran di Provinsi Maluku tergolong tinggi, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 rata-rata tingkat pengangguran masih mencapai 63,762 orang pertahun.

Tabel 4.1 menggambarkan pengangguran terbuka pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Dari Tabel 4.1 tersebut diketahui bahwa setiap kabupaten/kota di Provinsi Maluku mengalami pengangguran terbuka yang fluktuatif. Jika dilihat dari rata-rata tingkat penganggurannya, maka Kota Ambon memiliki rata-rata tingkat pengangguran tertinggi sebesar 22,500 orang yang kemudian disusul oleh Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan rata-rata tingkat pengangguran berturut-turut sebesar 15,033 orang dan 5,732 orang. Tingginya pengangguran terbuka di Kota Ambon disebabkan oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk dan sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Daerah-daerah yang memiliki pengangguran terendah adalah Kabupaten Buru Selatan (1,405 orang), Kabupaten Kep. Aru (1,739 orang), dan Kabupaten MBD (1,809 orang). Berikut adalah tabel tingkat pengangguran per kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Tabel (3) Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2010-2017

No	Kab./Kota	Pertumbuhan Ekonomi								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	MTB	2,386	3,259	5,192	4,320	2,887	2,816	2,785	2,419	3258
2	MALTRA	3,600	2,900	1,600	2,658	4,728	2,151	1,984	1,817	2679.75
3	MTGH	17,816	10,975	13,395	17,300	17,761	18,570	10,218	14,232	15033.4
4	BURU	2,800	3,300	1,000	1,472	1,776	2,808	3,108	1,995	2282.38
5	KEP. ARU	1,337	2,565	654	847	1,837	2,145	2,145	2,384	1739.25
6	SBB	4,680	5,139	4,544	6,066	8,492	5,721	6,162	5,055	5732.38
7	SBT	2,764	2,515	3,975	4,530	6,181	3,040	6,423	4,149	4197.13
8	MBD	2,253	1,657	1,239	1,196	1,218	1,240	2,634	3,036	1809.13
9	BURSEL	1,383	1,222	1,164	1,176	659	2,257	2,270	1,110	1405.13
10	AMBON	20,342	15,963	13,835	23,433	26,637	28,130	26,597	25,064	22500.1
11	TUAL	3,100	2,285	3,300	2,027	2,646	3,318	3,850	4,474	3125
PROV. MALUKU		62,461	51,780	49,898	65,025	74,822	72,196	68,176	65,735	63761.6

Sumber: BPS Provinsi Maluku

Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian suatu daerah dikatakan baik ditentukan oleh salah satu indikator makroekonomi dalam melaksanakan pembangunan daerah tersebut ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah atau negara dalam suatu periode tertentu (biasanya 1 tahun).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan output yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berada di daerah atau regional tertentu. PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah, memuat berbagai instrumen ekonomi yang didalamnya terlihat dengan jelas keadaan makroekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel (4) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2011-2017 (Persen)

No	Kab./Kota	Pertumbuhan Ekonomi							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	MTB	7.16	7.30	5.15	6.04	6.47	5.89	5.98	6.28
2	MTGR	5.98	7.07	5.88	6.25	5.47	5.71	5.92	6.04
3	MTGH	5.40	6.91	4.46	6.58	5.30	5.94	5.81	5.77
4	Buru	5.44	5.44	4.42	6.23	5.23	5.72	6.01	5.50
5	Kep. Aru	5.25	7.84	5.88	6.84	5.19	5.25	5.93	6.03
6	SBB	5.87	6.39	4.55	6.16	5.59	5.57	6.02	5.74
7	SBT	8.54	3.94	3.15	8.44	5.72	5.03	3.34	5.45
8	MBD	5.65	7.43	6.33	3.91	2.68	3.92	4.26	4.88
9	BurSel	4.63	5.20	5.37	6.28	6.74	6.04	6.11	5.77
10	Ambon	7.14	8.33	6.06	5.96	6.47	6.15	6.17	6.61
11	Tual	5.90	7.90	5.90	6.34	5.62	5.81	5.74	6.17
PDRB		6.09	6.70	5.20	6.28	5.50	5.55	5.57	5.84

Sumber: BPS Provinsi Maluku.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku cenderung berfluktuasi. Apabila dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan ekonominya, rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yaitu sebesar 5,84 persen. Meskipun rata-rata pertumbuhan ekonominya sebesar 5,84 persen bukan berarti semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku mampu memperoleh rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar tersebut. Terdapat beberapa daerah yang rata-rata laju pertumbuhan ekonominya berada dibawah nilai rata-rata laju pertumbuhan kabupaten/kota yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan.

Faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan laju pertumbuhan antar kabupaten/kota yaitu karena secara individu setiap daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda. Artinya kabupaten yang memiliki sumber daya yang melimpah tentu akan mampu memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sementara kabupaten/kota yang memiliki sumber daya yang terbatas atau sedikit, maka akan memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang rendah pula.

Selain itu, perkembangan pertumbuhan ekonomi kota dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. Fenomena memperlihatkan bahwa Kota Ambon yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi rata-rata tertinggi sebesar 6.61. Dimana kota Ambon merupakan Pusat kota Provinsi Maluku yang memiliki sumber pendapatan yang tinggi sehingga laju pertumbuhan ekonomi yang akan diperoleh menjadi tinggi pula.

Deskripsi Inflasi

Inflasi juga merupakan suatu masalah bagi ekonomi makro yang apabila tidak segera ditangani akan menyebabkan ketidakstabilan perekonomian yang pada akhirnya hanya akan memperburuk kinerja perekonomian suatu negara. Kestabilan nilai mata uang, baik inflasi maupun nilai tukar sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inflasi adalah kecenderungan dari harga yang naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas dan mengakibatkan pada sebagian besar dari harga-harga barang lain (Boediono, 1999).

Jika inflasi mengalami fluktuasi, maka kegiatan perekonomian akan cenderung menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Dampak dari kenaikan inflasi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Dikarenakan nilai riil pada mata uang mengalami penurunan.

Inflasi adalah proses peningkatan harga secara umum dan terus menerus. Indikator yang digunakan untuk melihat inflasi adalah PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*) deflator. Di mana Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Perkembangan inflasi (yang di proksi dengan PDRB Deflator) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel (5) Inflasi di Provinsi Maluku Per Kabupaten/Kota Tahun 2010-2017 (persen)

No.	Kab./Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	MTB	7.16	7.30	5.15	6.04	6.47	5.89	5.98	6.28
2	MTGR	5.98	7.07	5.88	6.25	5.47	5.71	5.92	6.04
3	MTENG	5.40	6.91	4.46	6.58	5.30	5.94	5.81	5.77
4	BURU	5.44	5.44	4.42	6.23	5.23	5.72	6.01	5.50
5	KEPARU	5.25	7.84	5.88	6.84	5.19	5.25	5.93	6.03
6	SBB	5.87	6.39	4.55	6.16	5.59	5.57	6.02	5.74
7	SBT	8.54	3.94	3.15	8.44	5.72	5.03	3.34	5.45
8	MBD	5.65	7.46	5.61	4.237	5.56	5.34	6.10	5.71
9	BURSEL	4.63	5.20	5.37	6.28	6.74	6.04	6.11	5.77
10	AMQ	7.14	8.33	6.06	5.96	6.47	6.15	6.17	6.61
11	TUAL	5.90	7.90	5.90	6.34	5.62	5.81	5.74	6.17

Sumber: BPS Provinsi Maluku, data diolah

Dari tabel 4.3 di atas bahwa tingkat inflasi (PDRB Deflator) di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Maluku mengalami fluktuatif. Akan tetapi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 hampir masing-masing kabupaten/kota terjadi kenaikan inflasi. Hal ini disebabkan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terjadi kenaikan harga BBM sehingga memicu kenaikan harga sandang dan pangan di Provinsi Maluku. Sedangkan pada tahun 2015 tingkat inflasi di masing-masing kabupaten/kota mengalami penurunan. Inflasi tertinggi berada di Kota Ambon rata-rata sebesar 6,61% dan inflasi terendah berada di Kabupaten Seram Bagian Timur rata-rata sebesar 5,45%.

Analisis Model Terbaik

Dalam analisis model data panel terdapat tiga macam pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kuadrat terkecil (*ordinary/pooled least square*), pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Pengujian statistik untuk memilih model pertama kali adalah dengan menggunakan uji *chow* menentukan apakah metode *Pooled least square* atau *Fixed effect* yang sebaiknya digunakan dalam membuat regresi data panel.

Pemilihan ini menggunakan uji analisis terbaik selengkapnya dijelaskan dalam tabel 4.4 berikut:

Tabel (6) Hasil Estimasi Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku

Variabel Dependen: Pengangguran Terbuka	Model		
	Fixed Effect	Random Effect	Common Effect
Konstanta	4.933599	4.382928	-1.510767
Standar Error	0.558168	0.533826	0.821126
Probabilitas	0.0000	0.0000	0.0698
Inflasi (Independen Variabel)	-4.093965	-3.936726	-0.236014
Standar Error	1.818532	2.005776	2.615880
Probabilitas	0.0278	0.0534	0.9284
PE (Independen Variabel)	-0.180861	-0.094552	0.819690
Standar Error	0.085593	0.080737	0.127824
Probabilitas	0.0385	0.2453	0.0000
R-squared	0.919362	0.051048	0.361241
F-statistik	60.80581	1.990365	20.92479
Probabilitas	0.000000	0.143894	0.000000

Sumber: BPS Provinsi Maluku. (data diolah)

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan dari kedua analisis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan *Uji Likelihood* dan *Hausman Test* keduanya menyarankan untuk menggunakan *Fixed Effect*, dan dari perbandingan uji pemilihan terbaik, maka model regresi yang digunakan dalam mengestimasi pengaruh Inflasi dan PDRB terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten/Kota) adalah *Fixed Effect Model*. Dipilihnya *Fixed Effect Model* karena memiliki probabilitas masing-masing variabel independen dan probabilitas keseluruhan variabel independen dari *Fixed Effect* lebih signifikan dibanding *Random Effect Model* atau *Common Effect Model* yang masing-masing variabel independennya kurang signifikan serta nilai R^2 yang menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* adalah model terbaik yang digunakan.

Pemilihan metode pengujian data panel dilakukan pada seluruh data sampel, uji *chow* dilakukan untuk memilih metode pengujian data panel antara *Pooled least square* atau *Fixed Effect*. Jika nilai F statistik pada uji *chow* signifikan, artinya metode *Fixed Effect* yang dipilih untuk mengolah data panel. Pemilihan metode pengujian dilakukan dengan menggunakan pilihan *Fixed Effect* dan *Random Effect* serta mengkombinasikan, baik *cross-section*, *period*, maupun gabungan *cross-section/period*.

Pemilihan Metode Pengujian Data Panel

Uji Chow (Uji Likelihood)

Uji Chow merupakan uji untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dengan *Common/Pool Effect Model*. Jika hasilnya menyatakan menerima hipotesis nol, maka model yang terbaik untuk digunakan adalah

Common Effect Model. Akan tetapi, jika hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol, maka model terbaik yang

digunakan adalah *Fixed Effect Model*, dan pengujian akan berlanjut ke uji hausman.

Tabel (7) Hasil Uji Chow (Uji *Likelihood*)

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	38.292927	(10,64)	0.0000

Sumber: BPS Provinsi Maluku. (data diolah)

Berdasarkan uji chow pada tabel 4.5 diatas, nilai probabilitas *Cross section F* yang lebih kecil dari Alpha 0,05 sehingga menolak uji hipotesis nol. Jadi menurut uji *chow*, model yang terbaik digunakan adalah model dengan

Uji Hausman

Hausman test ini bertujuan untuk membandingkan antara metode *fixed effect* dan metode *random effect*. Hasil dari pengujian dengan menggunakan tes ini ialah mengetahui metode mana yang sebaiknya dipilih. Berikut merupakan output dari uji menggunakan *Hausman Test*.

menggunakan metode *Fixed effect*. Berdasarkan hasil Uji *Chow* yang menolak hipotesis nol, maka pengujian data berlanjut ke Uji Hausman.

Tabel (8) Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	19.765145	2	0.0001

Sumber: BPS Provinsi Maluku. (data diolah)

Pada perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa nilai probability pada *test cross section random effect* memperlihatkan angka bernilai 0.0001 yang berarti signifikan dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 5\%$) dan menggunakan distribusi *Chi-Square* (Gujarati, 2003). Sehingga keputusan yang diambil pada pengujian *Hausman test* ini yaitu tolak H_0 ($p\text{-value} < 0.05$) dengan hipotesis:

H_0 : metode *random effects*

H_1 : metode *fixed effects*

Berdasarkan hasil dari pengujian *Hausman Test*, maka metode pilihan yang digunakan pada penelitian yaitu metode *Fixed Effect*.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect model*. Seperti telah kita ketahui dalam *Fixed Effect* atau Model Efek Tetap, perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan pada *intercept* sehingga *intercept* dari setiap kabupaten/kota berbeda-beda begitu juga dengan konstanta yang dimiliki berbeda-beda. Sehingga persamaan model secara individu berbeda.

Tabel (9) Hasil Regresi Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.933599	0.558168	8.838913	0.0000
INF?	-4.093965	1.818532	-2.251247	0.0278
PDRB?	-0.180861	0.085593	-2.113045	0.0385
Fixed Effects (Cross)				
_1MTB-C	-0.058455			
_2MTGR-C	-0.190944			
_3MTENG-C	0.653911			
_4BURU-C	-0.287819			
_5KEPARU-C	-0.351379			
_6SBB-C	0.185141			
_7SBT-C	0.042393			

_8MBD-C	-0.335215		
_9BURSEL-C	-0.478971		
_10KAMQ-C	0.927271		
_11KTUAL-C	-0.105933		
Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Weighted Statistics			
R-squared	0.919362	Mean dependent var	4.009797
Adjusted R-squared	0.904242	S.D. dependent var	1.436445
S.E. of regression	0.147784	Sum squared resid	1.397771
F-statistic	60.80581	Durbin-Watson stat	1.856220
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: BPS Provinsi Maluku. (data diolah)

Dalam persamaan diatas dapat dilihat bahwa koefisien regresi INF (Inflasi) adalah negatif yaitu sebesar 4.093965 dan koefisien PDRB bernilai negatif yaitu

sebesar 0.180861. Berikut ini adalah bentuk persamaan regresi dari 11 kabupaten/kota Provinsi Maluku.

Substituted Coefficients:
=====

$$PT_1MTB = -0.0584547355843 + 4.9335986915 - 4.09396459896 * INF_1MTB - 0.180860810578 * PDRB_1MTB$$

$$PT_2MTGR = -0.190943643634 + 4.9335986915 - 4.09396459896 * INF_2MTGR - 0.180860810578 * PDRB_2MTGR$$

$$PT_3MTENG = 0.653910766217 + 4.9335986915 - 4.09396459896 * INF_3MTENG - 0.180860810578 * PDRB_3MTENG$$

$$PT_4BURU = -0.287818550209 + 4.9335986915 - 4.09396459896 * INF_4BURU - 0.180860810578 * PDRB_4BURU$$

$$PT_5KEPARU = -0.351379343096 + 4.9335986915 - 4.09396459896 * INF_5KEPARU - 0.180860810578 * PDRB_5KEPARU$$

$$PT_6SBB = 0.185140739857 + 4.9335986915 - 4.09396459896 * INF_6SBB - 0.180860810578 * PDRB_6SBB$$

$$PT_7SBT = 0.0423927305641 + 4.9335986915 - 4.09396459896 * INF_7SBT - 0.180860810578 * PDRB_7SBT$$

$$PT_8MBD = -0.335214769158 + 4.9335986915 - 4.09396459896 * INF_8MBD - 0.180860810578 * PDRB_8MBD$$

$$PT_9BURSEL = -0.47897146234 + 4.9335986915 - 4.09396459896 * INF_9BURSEL - 0.180860810578 * PDRB_9BURSEL$$

$$PT_10KAMQ = 0.927271370926 + 4.9335986915 - 4.09396459896 * INF_10KAMQ - 0.180860810578 * PDRB_10KAMQ$$

$$PT_11KTUAL = -0.105933103542 + 4.9335986915 - 4.09396459896 * INF_11KTUAL - 0.180860810578 * PDRB_11KTUAL$$

Pengujian Hipotesis Uji T-Statistik

Yaitu pengujian statistik terhadap parameter-parameter regresi secara individual. Hal ini untuk membandingkan antara nilai Prob. dengan tingkat signifikansi 5%.

Tabel (10) Hasil Uji Signifikansi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.933599	0.558168	8.838913	0.0000
INF?	-4.093965	1.818532	-2.251247	0.0278
PDRB?	-0.180861	0.085593	-2.113045	0.0385
Weighted Statistics				
R-squared	0.919362	Mean dependent var		4.009797
Adjusted R-squared	0.904242	S.D. dependent var		1.436445
S.E. of regression	0.147784	Sum squared resid		1.397771
F-statistic	60.80581	Durbin-Watson stat		1.856220
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: BPS Provinsi Maluku. (data diolah)

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Inflasi (INF) di masing-masing daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Maluku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengangguran Terbuka masing-masing daerah tersebut, hal ini ditunjukkan dengan nilai Prob. (0.0278) yang lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi 5%, H_0 ditolak.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing daerah Kota/Kabupaten Provinsi Maluku berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran terbuka masing-masing daerah Kota/Kabupaten tersebut, hal ini ditunjukkan dengan nilai Prob. (0.0385) yang lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi 5%, H_0 ditolak.

Uji F-Statistik

Yaitu pengujian secara serempak (keseluruhan variabel bebas Inflasi dan PDRB) hubungan variabel-variabel independen secara keseluruhan dengan variabel dependen, dengan membandingkan antara Prob. Dengan tingkat signifikansi 5%. Prob. F-hitung yang dihasilkan adalah 0.000000 dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak, ini berarti variabel-variabel independen secara serempak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Pengangguran Terbuka). (Lihat Tabel 4.8).

Uji R-Squared

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variabel dependennya. Dari perhitungan diperoleh hasil bahwa **R-Squared** sebesar 0.919362 atau sekitar 91,94% dari variasi

pengangguran terbuka masing-masing Kota/Kabupaten di Provinsi Maluku dapat dijelaskan oleh variasi PDRB dan Inflasi (I) daerah masing-masing.

Interpretasi Hasil dan Pembahasan

Dari data yang diperoleh dilakukan pengolahan data menggunakan model *fixed effect* untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pengangguran Terbuka pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku tahun 2011-2017. Variabel dependen yang digunakan adalah Pengangguran Terbuka diproksi dengan jumlah pengangguran, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah PDRB dan Inflasi diproksi dengan PDRB Deflator.

Sebagai akibat dari penambahan variabel *dummy*, maka dapat di lihat dari persamaan hasil regresi pada Tabel 4.7 menunjukkan konstanta persamaan tiap-tiap daerah yang berbeda-beda, hal ini menyebabkan hasil regresi yang berbeda-beda pula untuk tiap daerahnya. Apabila diasumsikan semua variabel independen sama dengan nol, maka penurunan Pengangguran Terbuka adalah sebesar konstanta masing-masing daerah. Apabila asumsi tersebut dipenuhi, maka daerah yang penurunan Pengangguran Terbuka paling rendah adalah Kabupaten Buru Selatan (4.454628 persen), Kabupaten Kep. Aru (4.58222 persen), dan Kabupaten MBD (4.598384 persen), sedangkan Pengangguran Terbuka paling tinggi adalah Kota Ambon (5.86087 persen) dan Kabupaten Maluku Tengah (5.58751 persen).

Model *fixed effect* dalam penelitian ini mengasumsikan bahwa koefisien *slope* dari regresor tidak bervariasi antar individu dan waktu, sehingga dalam 11 persamaan pada Tabel 4.7 koefisiennya sama untuk tiap-tiap variabel independennya. Dari hasil regresi dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa Inflasi bertanda negatif dan

signifikan yang berarti bahwa Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku selama periode penelitian tahun 2011-2017. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0278 lebih kecil dari $\alpha = 5$ persen. Hasil regresi sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang menduga ada hubungan negatif antara Inflasi dengan Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku tahun 2011-2017.

Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Moch. Rum Alim (2007). Dari hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Inflasi berhubungan negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka. Hasil ini juga konsisten dengan hasil penelitian Artriyah Syahnur Tirta (2013) yang menerangkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap pengangguran dengan koefisien bertanda negative yang artinya bahwa penelitian yang dilakukan oleh Artriyah Sahnur Tirta sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Philips sebab inflasi yang terjadi disebabkan oleh tingginya permintaan kelompok bahan makanan, makanan jadi, perumahan sehingga dalam rangka memenuhi permintaan tersebut produsen membutuhkan banyak tenaga kerja. Oleh sebab itu pengangguran akan menjadi berkurang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Hukum Okun yang menjelaskan tentang hubungan negatif pertumbuhan GDP dengan pengangguran. Setiap kenaikan satu poin pengangguran akan terjadi penurunan pertumbuhan GDP sebesar dua poin. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku pada tahun 2012 sampai dengan 2016 memang telah mengalami kenaikan, akan tetapi kenyataannya pertumbuhan ekonomi ini masih belum dapat dikatakan berhasil. Tercatat masih banyak tingkat pengangguran yang terjadi, inflasi yang semakin tinggi, lapangan pekerjaan yang menurun di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku.

Dari hasil regresi dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi yang diproksi dengan PDRB bertanda negatif dan signifikan yang berarti bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku selama periode penelitian tahun 2011-2017. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0385 lebih kecil dari $\alpha = 5$ persen. Hasil regresi sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang menduga ada hubungan negatif antara PDRB dengan Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku tahun 2011-2017. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Firdaus (2015).

Dari hasil regresi menunjukkan hasil regresi panel dengan menggunakan pendekatan *fixed effect* dijelaskan bahwa variabel PDRB berhubungan negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka, jumlah penduduk berhubungan positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka. Sementara itu variabel inflasi dan UMK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Hukum Okun yang menjelaskan tentang hubungan negatif pertumbuhan GDP dengan pengangguran. Setiap kenaikan satu poin pengangguran akan terjadi penurunan pertumbuhan GDP sebesar dua poin. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku pada tahun 2011 sampai dengan 2017 memang telah mengalami kenaikan, akan tetapi kenyataannya pertumbuhan ekonomi ini masih belum dapat dikatakan berhasil. Tercatat masih banyak tingkat pengangguran yang terjadi, inflasi yang semakin tinggi, lapangan pekerjaan yang menurun di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab hasil dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Inflasi yang diproksi dengan PDRB Deflator berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -4,093965 dan probabilitas sebesar $0.0278 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Artinya ketika tingkat inflasi meningkat, maka pengangguran turun. Hal ini sesuai dengan teori A.W. Philips.
2. Pertumbuhan Ekonomi yang diproksi dengan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -0,180861 dan probabilitas sebesar $0.0385 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Artinya ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka akan menurunkan jumlah pengangguran, sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi turun, maka jumlah pengangguran naik. Hal ini sesuai dengan Hukum Okun.
3. Inflasi yang diproksi dengan PDRB Deflator dan Pertumbuhan Ekonomi yang diproksi dengan

PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar $0.000000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$).

Implikasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diberikan, maka dapat diberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pihak-pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi tetapi dapat membuat sektor-sektor ini dapat berkembang, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan tingginya kesempatan kerja yang ada.
2. Pemerintah maupun pihak-pihak terkait diharapkan dapat menjaga stabilitas tingkat inflasi dengan kebijakan fiskal berupa pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk mengembangkan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja seperti sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi inflasi tetapi tetap melakukan pengembangan pada sektor-sektor ini sebagai upaya meningkatkan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran.
3. Dari keterbatasan-keterbatasan studi ini, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambahkan tahun penelitian dan menambahkan obyek penelitian serta menambahkan faktor lain yang berhubungan dengan desentralisasi fiskal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

- Agus Widarjono. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*, Ekonosia, Jakarta.
- Aisyah, dede, (2006). "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik di Kota Semarang". Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi UNDIP,
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Artriyani, Syahnur Tirta (2013) meneliti tentang Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Investasi Terhadap Pengangguran Di Provinsi Jawa Tengah.

- Badan Pusat Statistik, Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Produk Domestik Regional Bruto 2010-2016.
- Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Daryono Soebagio (2007). Analisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Tingkat Pendidikan, Tingkat beban tanggungan penduduk terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Dati 1 Jawa Tengah".
- Fitra Kincaka Riska (2008). "Analisis Tingkat Pengangguran dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya di Indonesia".
- Firdaus (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM.SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar, (2003), *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumamo Zain, Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar N. (2006). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Heryani, Ade. (2009). "Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu tenaga kerja terdidik dalam mencari pekerjaan". Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi UNNES.
- Mankiw, N. Gregory. (2003), *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moch. Rum Alim (2007). "Analisis Faktor penentu pengangguran terbuka di Indonesia.
- Payaman, J Simanjuntak. (1998). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit FE UI.
- Prasetyo, Eko P. (2009). *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta : Beta Offset Yogyakarta.
- Riska, Fitra Kincaka. (2008). "Analisis Tingkat Pengangguran dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Indonesia". Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi UNDIP
- Rum, Alim Moch (Ed). (2007). Analisis Faktor Penentu Pengangguran Terbuka di Indonesia Periode 1980-2007".
- Simanjuntak, Payaman. (2001). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE. UI.
- Soebagio, Daryono. (2007). "Analisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Tingkat Pendidikan, Tingkat Beban tanggungan penduduk terhadap Pengangguran di Jawa Tengah". Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi UNDIP.
- Suharyadi dan Purwanto S.K. (2003). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat
- Sukirno, Sadono. (2003). *Pengantar Teori Makro*

-
- Ekonomi*"(ed.2). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, Sonny. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Todaro P. Michael. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Tulus, H Tambunan. (2001). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Triyanto, Suseno Widodo. (1990). *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: KANISIUS
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Ketenagakerjaan Tahun 2003.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Halaman ini sengaja dikosongkan